
**PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEPEMILIKAN ASING,
KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN KEPEMILIKAN PEMERINTAH
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DI INDONESIA**

Dina Nellysa¹
Riswanda I. Lingga,
Anggia Syafitri³,
Miki Indika⁴,
Yayuk Marliza⁵

¹²³⁴ · Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Musi Rawas

dinanellysaneldian@gmail.com, Riswandhaimawanlingga@gmail.com,
syafitrianggia82@gmail.com, miki.unmura@gmail.com, yayukmarliza@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the effects of managerial, foreign, institutional, and government ownership on corporate tax avoidance among Indonesian listed firms. Tax avoidance is measured using two proxies, effective tax rate (ETR) and book-tax difference (BTD), to provide a more cautious assessment of the evidence. Secondary data were collected from annual reports and financial statements of firms listed on the Indonesia Stock Exchange during 2018–2022. Using purposive sampling, the study obtains 179 firms and 895 firm-year observations. The hypotheses are tested using fixed-effect panel regression while retaining corporate-governance characteristics, profitability, firm size, and leverage as control variables. The results show that managerial and government ownership have no significant effect on either ETR or BTD. Foreign and institutional ownership are significant, yet their directions differ across the two tax-avoidance measures. Foreign ownership increases both ETR and BTD, whereas institutional ownership decreases both ETR and BTD. These findings demonstrate that a single proxy is insufficient for assessing tax avoidance because ETR and BTD capture different dimensions of corporate tax strategies. The study suggests that tax authorities and investors should consider ownership structure jointly with multiple tax indicators before inferring a firm's tax aggressiveness.

Keywords: managerial ownership, foreign ownership, institutional ownership, government ownership, tax avoidance.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan negara yang penting, sedangkan bagi perusahaan pajak dipandang sebagai pengeluaran yang mengurangi laba setelah pajak. Perbedaan kepentingan tersebut mendorong perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak, termasuk penghindaran pajak, sepanjang tindakan yang dilakukan masih berada dalam koridor ketentuan perpajakan. Dalam literatur, penghindaran pajak dipahami sebagai berbagai aktivitas yang mengurangi kewajiban pajak eksplisit perusahaan (Dyrenge et al., 2008; Hanlon & Heitzman, 2010). Meskipun bersifat legal, strategi pajak yang terlalu agresif dapat memunculkan risiko reputasi, risiko kepatuhan, serta biaya keagenan antara pemegang saham dan manajemen.

Keputusan perpajakan tidak hanya ditentukan oleh kinerja keuangan, tetapi juga oleh struktur kepemilikan perusahaan. Pemegang saham dengan karakteristik yang berbeda dapat memiliki kepentingan, kemampuan monitoring, dan toleransi risiko yang berbeda terhadap strategi pajak. Dalam konteks perusahaan publik di Indonesia, kepemilikan saham sering kali terkonsentrasi pada kelompok tertentu, seperti manajemen, investor asing, lembaga institusional, maupun pemerintah. Struktur tersebut relevan karena pemegang saham pengendali dapat memengaruhi arah keputusan manajerial, termasuk keputusan mengenai tingkat pajak yang dibayar perusahaan.

Bukti empiris sebelumnya masih belum konsisten. Kepemilikan manajerial dapat menurunkan konflik keagenan karena manajer turut menanggung konsekuensi ekonomi dari keputusan yang dibuat. Akan tetapi, kepemilikan manajerial juga berpotensi memperkuat perilaku oportunistik apabila manajemen memiliki keleluasaan untuk memilih strategi pajak yang meningkatkan kepentingannya sendiri (Cabello et al., 2018; Alkurdi & Mardini, 2020). Pada kepemilikan asing, Salihu et al. (2015) menunjukkan bahwa investor asing dapat mendorong kepatuhan pajak melalui tata kelola dan reputasi internasional, sementara Shi et al. (2020) menemukan kemungkinan peningkatan penghindaran pajak pada perusahaan dengan kepemilikan asing yang lebih besar.

Perbedaan temuan juga muncul pada kepemilikan institusional dan kepemilikan pemerintah. Investor institusional dapat menjalankan fungsi monitoring yang lebih efektif, tetapi dapat pula mendorong efisiensi pajak untuk memenuhi target imbal hasil jangka pendek (Khan et al., 2017; Ying et al., 2017). Sementara itu, kepemilikan pemerintah secara teoritis berkaitan dengan kepentingan negara dalam menjaga penerimaan pajak. Namun, tujuan sosial, politik, dan komersial pada perusahaan yang memiliki keterlibatan pemerintah tidak selalu berjalan dalam arah yang sama (Bradshaw et al., 2018; Li et al., 2017).

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial, asing, institusional, dan pemerintah terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kontribusi penelitian terletak pada penggunaan dua proksi penghindaran pajak, yaitu ETR dan BTDR. ETR menggambarkan proporsi beban pajak terhadap laba sebelum pajak dan berinterpretasi terbalik dengan penghindaran pajak, sedangkan BTDR menggambarkan perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal yang diskalakan dengan total aset. Dengan dua ukuran tersebut, penelitian dapat menunjukkan apakah hubungan antara struktur kepemilikan

dan penghindaran pajak konsisten atau justru sensitif terhadap ukuran yang digunakan.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan dan Penghindaran Pajak

Teori keagenan menjelaskan hubungan kontraktual antara pemegang saham sebagai principal dan manajemen sebagai agent. Ketika pemilik mendelegasikan pengambilan keputusan kepada manajer, terdapat kemungkinan manajer mengambil keputusan yang lebih menguntungkan dirinya daripada pemegang saham. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa perbedaan kepentingan tersebut menimbulkan biaya keagenan dan memerlukan mekanisme pengawasan. Struktur kepemilikan dapat menjadi salah satu mekanisme tersebut karena pemegang saham yang memiliki kepentingan ekonomi lebih besar akan terdorong untuk memantau keputusan manajerial.

Dalam penghindaran pajak, keputusan untuk menekan beban pajak dapat meningkatkan laba setelah pajak, tetapi pada saat yang sama dapat meningkatkan risiko pemeriksaan, denda, dan dampak reputasi. Oleh karena itu, pemegang saham tidak selalu memiliki preferensi yang sama terhadap agresivitas pajak. Variasi kepentingan dan kapasitas monitoring pada setiap kelompok pemilik menjadi alasan utama penelitian ini menguji kepemilikan manajerial, asing, institusional, dan pemerintah secara terpisah.

Kepemilikan Manajerial dan Penghindaran Pajak

Kepemilikan manajerial adalah proporsi saham yang dimiliki oleh anggota manajemen, baik direksi maupun komisaris. Kepemilikan tersebut dapat menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham karena manajer turut menanggung manfaat dan risiko dari keputusan perusahaan. Namun, ketika kepemilikan manajemen cukup besar, manajer juga dapat memiliki kekuatan untuk mempertahankan kebijakan yang menguntungkan dirinya. Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam, sehingga hubungan kepemilikan manajerial dan penghindaran pajak perlu diuji kembali pada konteks Indonesia.

H1: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan Asing dan Penghindaran Pajak

Kepemilikan asing merepresentasikan proporsi saham yang dimiliki oleh individu, institusi, atau pemerintah dari luar negeri. Investor asing dapat membawa praktik tata kelola, transparansi, dan perhatian terhadap reputasi yang lebih kuat sehingga membatasi tindakan pajak agresif. Di sisi lain, perusahaan dengan keterlibatan asing dapat memiliki transaksi lintas batas dan struktur usaha yang lebih kompleks, yang berpotensi menciptakan perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal. Dengan demikian, arah hubungan perlu dibuktikan secara empiris.

H2: Kepemilikan asing berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan Institusional dan Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh lembaga seperti perusahaan investasi, dana pensiun, bank, asuransi, atau badan usaha lainnya. Kepemilikan institusional berpotensi meningkatkan kualitas pengawasan karena investor institusi memiliki sumber daya dan insentif untuk memantau manajemen. Akan tetapi, fokus terhadap pengembalian investasi dapat mendorong manajemen untuk melakukan

efisiensi pajak. Ketegangan antara fungsi monitoring dan tekanan terhadap kinerja menjadikan pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak belum bersifat tunggal.

H3: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan Pemerintah dan Penghindaran Pajak

Kepemilikan pemerintah adalah proporsi saham yang dimiliki oleh negara atau pemerintah. Perusahaan dengan kepemilikan pemerintah secara teoritis memiliki dorongan lebih kuat untuk menjaga kepatuhan karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Namun, perusahaan tersebut juga dapat menghadapi tuntutan pencapaian kinerja dan nilai perusahaan. Perbedaan orientasi tersebut dapat menjadikan kepemilikan pemerintah tidak selalu menghasilkan perilaku pajak yang lebih konservatif.

H4: Kepemilikan pemerintah berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018–2022. Pemilihan sampel dilakukan secara purposive sampling. Perusahaan harus tercatat secara terus-menerus pada periode penelitian, menyajikan laporan keuangan dalam rupiah, memiliki data yang lengkap, serta tidak mengalami kerugian selama periode observasi. Kriteria tersebut digunakan agar pengukuran ETR dapat dilakukan secara memadai dan data antarperusahaan dapat dibandingkan.

Tabel 1. Proses Pemilihan Sampel

Kriteria	Jumlah Perusahaan
Perusahaan yang tercatat secara terus-menerus di BEI tahun 2018–2022	604
Dikurangi: perusahaan yang tidak menggunakan mata uang rupiah	(75)
Dikurangi: perusahaan dengan data keuangan tidak lengkap	(123)
Dikurangi: perusahaan yang mengalami kerugian selama periode penelitian	(227)
Total sampel Perusahaan	179
Tahun pengamatan	5
Total observasi perusahaan-tahun	895

Sumber: Diolah dari BEI (2024).

Definisi Operasional Variabel

Tabel 2. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Kode	Pengukuran	Interpretasi
Effective tax rate	ETR	Beban pajak penghasilan / laba sebelum pajak	ETR lebih rendah menunjukkan penghindaran pajak lebih tinggi
Book-tax difference	BTD	(Laba komersial sebelum pajak - laba fiskal) / total asset	BTD lebih tinggi menunjukkan penghindaran pajak lebih tinggi
Kepemilikan manajerial	MO	Saham yang dimiliki manajemen / total saham beredar	Proporsi kepemilikan manajemen
Kepemilikan asing	FO	Saham yang dimiliki pihak asing / total saham beredar	Proporsi kepemilikan asing
Kepemilikan institusional	IO	Saham yang dimiliki institusi / total saham beredar	Proporsi kepemilikan institusi
Kepemilikan pemerintah	GO	Saham yang dimiliki pemerintah / total saham beredar	Proporsi kepemilikan pemerintah
Profitabilitas	PROFIT	Laba sebelum pajak / total aset	Variabel pengendali
Ukuran perusahaan	SIZE	Ln(total aset)	Variabel pengendali
Leverage	LEV	Total utang / total ekuitas	Variabel pengendali

Sumber: Diolah dari operasionalisasi variabel (2024).

Selain empat variabel kepemilikan, spesifikasi regresi mempertahankan kovariat tata kelola perusahaan yang digunakan dalam tesis sumber, yaitu ukuran dan independensi dewan komisaris, ukuran komite audit, proporsi anggota perempuan pada komite audit, independensi komite audit, serta proporsi ahli keuangan dan akuntansi pada komite audit. Kovariat tersebut dipertahankan untuk mengurangi potensi bias karena tata kelola internal juga berhubungan dengan keputusan perpajakan perusahaan.

Model empiris diestimasi dalam dua persamaan. Persamaan pertama menggunakan ETR sebagai proksi penghindaran pajak dan persamaan kedua menggunakan BTD. Bentuk umum model adalah sebagai berikut:

$$TaxAvoidance_{it} = \alpha + \beta_1 MO_{it} + \beta_2 FO_{it} + \beta_3 IO_{it} + \beta_4 GO_{it} + \gamma Controls_{it} + \mu_i + \varepsilon_{it}$$

Pengujian dilakukan menggunakan EViews 12. Estimasi koefisien akhir mengikuti fixed effect model sebagaimana hasil regresi utama pada tesis sumber. Uji

multikolinearitas dan heteroskedastisitas dilakukan sebelum interpretasi hasil regresi. Pengaruh parsial dinilai berdasarkan nilai probabilitas pada tingkat signifikansi 5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif pada Tabel 3 menunjukkan bahwa rata-rata ETR perusahaan sampel sebesar 0,237659 dan rata-rata BTD sebesar 0,024315. Rata-rata kepemilikan manajerial hanya 0,062723 atau sekitar 6,27%, sedangkan kepemilikan institusional merupakan struktur kepemilikan yang paling dominan dengan rata-rata 65,65%. Rata-rata kepemilikan asing sebesar 15,78%, sementara kepemilikan pemerintah sebesar 5,01%. Pola ini mengindikasikan bahwa sebagian besar perusahaan sampel lebih banyak dimiliki oleh institusi dibandingkan manajemen ataupun pemerintah.

Tabel 3. Statistik Deskriptif Variabel Utama

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Std. Deviasi
ETR	895	-0,622677	4,839268	0,237659	0,278936
BTD	895	-1,254849	0,533294	0,024315	0,088313
MO	895	0,000000	1,000000	0,062723	0,163707
FO	895	0,000000	0,993468	0,157810	0,281024
IO	895	0,000000	1,000000	0,656497	0,240883
GO	895	0,000000	0,796771	0,050142	0,169995

Sumber: Data sekunder diolah menggunakan EViews 12, 2024.

Hasil Regresi Data Panel

Hasil pengujian menunjukkan bahwa model secara simultan signifikan pada kedua proksi penghindaran pajak dengan probabilitas F-statistic sebesar 0,0000. Nilai adjusted R^2 untuk persamaan ETR sebesar 0,897256 dan untuk persamaan BTD sebesar 0,918073. Nilai tersebut perlu dibaca dalam konteks penggunaan fixed effect dan sejumlah kovariat tata kelola dalam model. Uji heteroskedastisitas menghasilkan probabilitas Obs* R^2 sebesar 0,2132 untuk persamaan ETR dan 0,1082 untuk persamaan BTD, sehingga tidak ditemukan indikasi heteroskedastisitas pada kedua model.

Tabel 4. Hasil Uji Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Penghindaran Pajak

Variabel	ETR: Koefisien	p- value	BTD: Koefisien	p- value	Kesimpulan
Kepemilikan manajerial (MO)	-0,579290	0,3101	0,399067	0,3222	Tidak signifikan pada ETR dan BTB
Kepemilikan asing (FO)	2,259820***	0,0000	1,851038***	0,0000	Signifikan; arah interpretasi berbeda antarproksi

Variabel	ETR: Koefisien	p- value	BTD: Koefisien	p- value	Kesimpulan
Kepemilikan institusional (IO)	- 0,772926***	0,0023	- 1,007091***	0,0007	Signifikan; arah interpretasi berbeda antarproksi
Kepemilikan pemerintah (GO)	11,289548	0,1939	-1,498346	0,1435	Tidak signifikan pada ETR dan BTD
Adjusted R ²	0,897256		0,918073		
Prob. F-statistic	0,000000		0,000000		

Sumber: Output EViews 12. *** signifikan pada tingkat 1%.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, baik ketika penghindaran pajak diukur dengan ETR maupun BTD. Nilai probabilitas masing-masing sebesar 0,3101 dan 0,3222 menunjukkan bahwa H1 tidak didukung. Hasil ini mengindikasikan bahwa keberadaan saham yang dimiliki manajemen belum cukup kuat untuk mengubah keputusan perpajakan perusahaan secara sistematis.

Kondisi tersebut dapat dipahami dari rendahnya rata-rata kepemilikan manajerial dalam sampel, yaitu sekitar 6,27%. Pada tesis sumber juga tercatat bahwa hanya 43 dari 895 observasi, atau sekitar 4,8%, memiliki kepemilikan manajerial di atas 50%. Dengan kepemilikan yang relatif kecil, manajer belum tentu memiliki pengaruh yang memadai untuk menentukan arah strategi pajak perusahaan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Jamei (2017) dan Yulistia et al. (2020) yang tidak menemukan pengaruh signifikan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap ETR dengan koefisien 2,259820. Karena ETR memiliki interpretasi terbalik, kenaikan kepemilikan asing berkaitan dengan kenaikan ETR atau tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah. Hasil ini konsisten dengan argumen bahwa investor asing dapat membawa standar tata kelola, tekanan reputasi, dan mekanisme monitoring yang lebih kuat. Dengan demikian, perusahaan dengan kepemilikan asing yang lebih tinggi cenderung kurang agresif ketika penghindaran pajak dibaca melalui ETR.

Namun, pada pengukuran BTD, kepemilikan asing juga berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien 1,851038. BTD yang lebih tinggi secara umum menunjukkan perbedaan laba komersial dan laba fiskal yang lebih besar, sehingga mengarah pada tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa hubungan kepemilikan asing dengan penghindaran pajak tidak dapat ditafsirkan secara tunggal. ETR lebih dekat dengan beban pajak relatif terhadap laba pada satu periode, sedangkan BTD juga dapat dipengaruhi oleh perbedaan waktu pengakuan, karakter transaksi, serta struktur pelaporan fiskal. Karena itu, hasil BTD perlu dibaca sebagai indikasi adanya perbedaan pelaporan yang lebih besar, bukan otomatis sebagai bukti tunggal praktik pajak agresif. Temuan ini mempertemukan dua pandangan literatur: peran monitoring investor asing seperti yang dikemukakan

Salihu et al. (2015), sekaligus kemungkinan kompleksitas strategi pajak pada perusahaan dengan kepemilikan asing seperti yang ditemukan Shi et al. (2020).

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ETR dengan koefisien -0,772926. Dalam interpretasi ETR, hasil tersebut berarti semakin tinggi kepemilikan institusional, semakin rendah ETR dan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak. Salah satu kemungkinan penjelasan adalah investor institusional mendorong manajemen melakukan efisiensi pajak agar laba setelah pajak dan tingkat pengembalian investasi meningkat. Hasil ini sejalan dengan pandangan bahwa pemilik institusional dapat mendukung strategi pajak yang meningkatkan nilai ekonomi pemegang saham (Khan et al., 2017).

Sebaliknya, kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap BTD dengan koefisien -1,007091. Karena BTD yang lebih rendah menunjukkan penghindaran pajak yang lebih rendah, hasil ini mengarah pada fungsi monitoring investor institusional yang membatasi perbedaan besar antara laba komersial dan laba fiskal. Perbedaan arah interpretasi antara ETR dan BTD memperlihatkan adanya dua sisi peran investor institusional: mendukung efisiensi pajak pada tingkat beban pajak, tetapi tetap membatasi perbedaan pelaporan yang terlalu lebar. Pola ini sejalan dengan temuan Ying et al. (2017) yang memperlihatkan hubungan negatif kepemilikan institusional dengan agresivitas pajak ketika menggunakan BTD.

Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Pada ETR, koefisien kepemilikan pemerintah sebesar 11,289548 dengan probabilitas 0,1939; pada BTD, koefisien sebesar -1,498346 dengan probabilitas 0,1435. Dengan demikian, H4 tidak didukung pada kedua pengukuran.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah sebagai pemegang saham belum secara otomatis menghasilkan kebijakan pajak yang lebih patuh atau lebih agresif. Perusahaan dengan kepemilikan pemerintah tetap dapat menghadapi kombinasi tujuan komersial, pelayanan publik, dan kebijakan sektoral yang berbeda-beda. Selain itu, tingkat kepemilikan pemerintah dalam sampel tidak selalu merupakan kepemilikan pengendali. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang tidak menemukan pengaruh signifikan kepemilikan pemerintah terhadap penghindaran pajak. Secara praktis, identitas pemilik pemerintah saja belum cukup untuk memprediksi perilaku pajak tanpa mempertimbangkan besarnya pengendalian dan karakter perusahaan.

IMPLIKASI

Secara teoretis, hasil penelitian mendukung perspektif keagenan bahwa struktur kepemilikan memiliki keterkaitan dengan keputusan pajak, tetapi hubungan tersebut tidak bersifat seragam untuk seluruh tipe pemilik. Kepemilikan asing dan institusional terbukti signifikan, sedangkan kepemilikan manajerial dan pemerintah tidak. Selain itu, perbedaan hasil antara ETR dan BTD menunjukkan pentingnya pemilihan proksi dalam penelitian penghindaran pajak. Penggunaan satu indikator berisiko menghasilkan kesimpulan yang terlalu sederhana terhadap perilaku perpajakan perusahaan.

Secara praktis, otoritas pajak dapat menggunakan struktur kepemilikan sebagai salah satu informasi pemetaan risiko, khususnya untuk perusahaan yang memiliki kepemilikan asing atau institusional yang besar. Namun, struktur kepemilikan tidak sebaiknya dijadikan satu-satunya dasar pengawasan. Analisis juga perlu mempertimbangkan transaksi lintas batas, karakteristik industri, profitabilitas, serta perbedaan antara laporan komersial dan fiskal. Bagi investor, hasil ini menegaskan bahwa efisiensi pajak tidak selalu identik dengan risiko yang rendah; perbedaan laba komersial dan laba fiskal yang tinggi tetap perlu ditelaah secara kritis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, baik ketika diukur menggunakan ETR maupun BTD. Kepemilikan asing dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan, tetapi hasilnya tidak sepenuhnya konsisten pada kedua proksi. Kepemilikan asing meningkatkan ETR yang mengarah pada penurunan penghindaran pajak, tetapi sekaligus meningkatkan BTD yang mengarah pada kenaikan penghindaran pajak. Kepemilikan institusional menurunkan ETR yang mengarah pada kenaikan penghindaran pajak, sekaligus menurunkan BTD yang mengarah pada penurunan penghindaran pajak.

Perbedaan arah tersebut tidak harus dipahami sebagai kontradiksi semata, melainkan sebagai bukti bahwa ETR dan BTD menangkap dimensi yang berbeda dari strategi perpajakan perusahaan. Oleh karena itu, penelitian berikutnya disarankan menggunakan tambahan proksi, seperti cash effective tax rate atau long-run cash ETR, serta menguji peran moderasi kualitas audit, koneksi politik, dan kompleksitas operasi internasional. Penelitian juga dapat membedakan antara kepemilikan asing berbasis individu dan institusi, serta kepemilikan pemerintah mayoritas dan minoritas agar mekanisme pengaruhnya dapat dijelaskan lebih spesifik.

KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data perusahaan yang tercatat secara terus-menerus di BEI, menyajikan laporan dalam rupiah, memiliki data lengkap, dan tidak mengalami kerugian selama 2018–2022. Kriteria tersebut meningkatkan keterbandingan data, tetapi membatasi generalisasi pada perusahaan rugi, perusahaan dengan mata uang pelaporan selain rupiah, atau perusahaan yang baru tercatat. Selain itu, BTD dapat menangkap perbedaan pelaporan yang tidak seluruhnya berasal dari penghindaran pajak. Hasil penelitian karena itu perlu ditafsirkan secara hati-hati dan dikonfirmasi menggunakan ukuran penghindaran pajak lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkurdi, A., & Mardini, G. H. (2020). The impact of ownership structure and the board of directors' composition on tax avoidance strategies: Empirical evidence from Jordan. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 18(4), 795–812. <https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2020-0001>
- Bradshaw, M., Liao, G., & Ma, M. S. (2018). Agency costs and tax planning when the government is a major shareholder. *Journal of Accounting and Economics*, 67, 255–277. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2018.10.002>

- Cabello, O., Gaio, L., & Watrin, C. (2018). Tax avoidance in management-owned firms: Evidence from Brazil. *International Journal of Managerial Finance*, 15(4), 580–592. <https://doi.org/10.1108/IJMF-04-2018-0117>
- Dyreng, S., Hanlon, M., & Maydew, E. (2008). Long-run corporate tax avoidance. *The Accounting Review*, 83(1), 61–82. <https://doi.org/10.2308/accr.2008.83.1.61>
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Jamei, R. (2017). Tax avoidance and corporate governance mechanisms: Evidence from Tehran Stock Exchange. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(4), 638–644.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Khan, M., Srinivasan, S., & Tan, L. (2017). Institutional ownership and corporate tax avoidance: New evidence. *The Accounting Review*, 92(2), 101–122. <https://doi.org/10.2308/accr-51529>
- Li, O. Z., Liu, H., & Ni, C. (2017). Controlling shareholders' incentive and corporate tax avoidance: A natural experiment in China. *Journal of Business Finance & Accounting*, 44(5–6), 697–727. <https://doi.org/10.1111/jbfa.12243>
- Salihu, I. A., Annuar, H. A., & Sheikh Obid, S. N. (2015). Foreign investors' interests and corporate tax avoidance: Evidence from an emerging economy. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 11(2), 138–147. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2015.03.001>
- Shi, A. A., Concepcion, F. R., Laguinday, C. M. R., Ong Hian Huy, T. A. T., & Unite, A. A. (2020). An analysis of the effects of foreign ownership on the level of tax avoidance across Philippine publicly listed firms. *DLSU Business & Economics Review*, 30(1), 1–14.
- Syukur, M., Marzuki, M. M., & Zakaria, M. (2022). Ownership structure and tax avoidance in Asia: A systematic literature review and a research agenda. *Journal of Tax Reform*, 8(2), 170–185. <https://doi.org/10.15826/jtr.2022.8.2.115>
- Wahyuni, S. (2024). Pengaruh struktur kepemilikan, komposisi dewan komisaris dan karakteristik komite audit terhadap penghindaran pajak di Indonesia [Tesis magister, Universitas Bengkulu].
- Ying, T., Wright, B., & Huang, W. (2017). Ownership structure and tax aggressiveness of Chinese listed companies. *International Journal of Accounting and Information Management*, 25(3), 313–332. <https://doi.org/10.1108/IJAIM-07-2016-0070>
- Yulistia, R., Minovia, A. F., & Anison, F. P. (2020). Ownership structure, political connection and tax avoidance. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 11(12), 497–512.